

FENOMENA KEKERASAN SOSIAL DI PERKOTAAN DAN LANGKAH ANTISIPASINYA PADA TUGAS PEMOLISIAN

Yulizar Syafri

Tulisan ini bermaksud menguraikan tentang konteks tumbuhnya fenomena kekerasan dalam kehidupan masyarakat luas serta upaya sistematis penanganannya dalam tugas pemolisian. Dalam tulisan ini kekerasan dilihat sebagai produk dari terjadinya konflik sosial baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Pemikiran yang akan dikembangkan dalam tulisan ini adalah bahwa keberbedaan semata tidaklah serta merta menimbulkan ketegangan maupun perseteruan, namun selalu ada isu perebutan sumber daya yang langka tetapi strategis sebagai pangkal ketegangan, yang bilamana meletus menjadi konflik kekerasan, mendorong mereka yang bertikai untuk mengaktifkan identitas askriptif yang terkuat guna menggalang kekuatan.

Dunia yang semakin penuh persaingan (kontestan)

Sejak Louis Wirth mengembangkan konsep tentang *urbanism as way of life* (cara hidup orang kota), timbul semacam kepercayaan bahwa kehidupan di perkotaan itu sungguh menunjukkan karakter yang *impersonal*. Karakter sebuah kota yang *impersonal* tersebut menyebabkan mudahnya hubungan kekerabatan, hubungan satu daerah asal, serta tradisi-tradisi sukubangsa atau kesukubangsaan pada masyarakat perkotaan. Beranjak dari pemikiran Wirth ini banyak ahli kemudian meyakini bahwa kehidupan di masyarakat perkotaan cenderung melemahkan, kalau tidak menghilangkan sama sekali ikatan-ikatan kekerabatan maupun juga kesukubangsaan.

Namun demikian banyak studi yang justru menunjukkan keadaan sebaliknya. Sebut saja misalnya Edward M. Bruner (1980) telah menunjukkan bahwa isu kesukubangsaan maupun pengorganisasiannya tumbuh subur di daerah perkotaan dan cenderung tidak ditemukan di daerah asal sukubangsa yang bersangkutan. Terkait dengan fenomena ini, sebuah pemikiran teoritis dari Abner Cohen (1980) yang masih relevan sampai saat ini untuk didiskusikan adalah penjelasan bahwa kesukubangsaan merupakan fenomena yang selalu tumbuh di mana-mana, dan menjadi dasar pengorganisasian diri masyarakat di perkotaan. Oleh karena itu tentu saja tidak mengherankan bila dalam kondisi di

mana munculnya ketidaksetaraan dalam pendistribusian *wealth*, *prestige* maupun *power*, atau dalam upaya mempertahankan hidup, kontestasi untuk memperoleh porsi pendapatan yang lebih dalam sistem ekonomi yang berlaku, termasuk di dalamnya untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, pendidikan yang lebih baik serta berbagai keuntungan lainnya, akan selalu terkait dengan pengaktifan maupun pemanipulasian kesukubangsaan. Kesukubangsaan merupakan salah satu sumber kekuatan (sosial) guna memenangkan berbagai kontestasi tersebut. Dalam *idiom* penelitian ilmiah, kesukubangsaan diletakkan sebagai variabel, yang bersifat interdependen dengan variabel-variabel lainnya.

Oleh karena itu sukar dipungkiri bahwa kerjasama, persaingan maupun konflik merupakan pola hubungan sosial yang mendorong ditampilkannya kesukubangsaan dalam kehidupan masyarakat di perkotaan. Interaksi tersebut berlangsung dalam konteks-konteks ekonomi maupun politik. Dalam berbagai konteks tersebut relasi antar sukubangsa berkembang dalam format hubungan antar kekuatan sosial. Dan, dalam konteks relasi antar sukubangsa maka kekerasan sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat luas seringkali terungkap sebagai konflik sosial yang dapat mengaktifkan kekuatan askriptif kesukubangsaan. Berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai kota belakangan ini menunjukkan dengan jelas kiatnya relasi antar sukubangsa tersebut.

Kajian kesukubangsaan yang awalnya berfokus pada isi kebudayaan suatu sukubangsa hanya menghasilkan taksonomi kebudayaan, serta keterisolisasian batas-batas geografis. Diperlukan pergeseran paradigma yang lebih terfokus melihat kesukubangsaan (identitas sukubangsa) sebagai sebuah fenomena yang muncul di dalam dan melalui interaksi sosial. Sebab pendekatan atau paradigma yang berkembang pada kajian awal tentang kesukubangsaan tersebut hanya akan menjawab permasalahan-permasalahan terkait dengan perbedaan sukubangsa yang menekankan pada perbedaan ras, budaya, sosial, dan bahasa semata (Barth, 1980:12). Oleh karenanya mengandung banyak kelemahan, terutama dalam menjawab gejala-gejala yang lebih kompleks dan mendalam, seperti proses-proses yang berkembang dalam hubungan antar sukubangsa serta konteks-konteks pendukungnya.

Paradigma baru yang dikembangkan dalam mengkaji persoalan kesukubangsaan lebih menekankan pada konstruksi batas-batas sosial, di mana penciptaan batas-batas sosial tersebut dipengaruhi oleh penilaian sosial yang

dijadikan pedoman untuk mengkategorisasikan keanggotaan satu sukubangsa. Berdasarkan pemikiran seperti ini Barth, dkk (1969) memformulasikan bahwa:

“The genesis and persistence of ethnicity, which include ethnic boundaries, the incorporation of ethnic population, and the organization of ethnics are generally related to competition for economic resources and positions”.

Relevansi pemikiran Barth (1969) terhadap pembahasan relasi antar sukubangsa di perkotaan terletak pada penekanannya bahwa batas-batas sukubangsa dan pengorganisasiannya muncul dalam kaitannya dengan situasi persaingan dalam penguasaan sumberdaya ekonomi dan politik, terutama di daerah perkotaan. Kompetisi dan terutama konflik antar sukubangsa yang mengekspresikan ragam kekerasan berlangsung karena adanya mobilitas, kontak, dan tukar menukar informasi yang berlangsung melalui proses-proses sosial yang muncul dalam menjaga batas-batas sukubangsa. Sebab batas-batas sukubangsa dapat dipertahankan melalui interaksi sosial di antara warga yang berbeda kategori sukubangsanya, serta berlangsung dalam struktur sosial masyarakat setempat yang heterogen.

Konsekuensinya batas sosial sukubangsa akan berubah atau bergeser karena kondisi dasarnya memang fluktuatif, atau tergantung dari pemahaman individu dan kelompok terhadap lingkungan interaksi sosialnya. Selain itu dasar-dasar penilaian sosial tergantung dari konteks sosial dan strategi pencapaian tujuan yang ingin didapatkan oleh pelaku yang ikut serta dalam interaksi tersebut. Dengan demikian proses pembentukan identitas sukubangsa merupakan suatu proses pelanggaran atau penajaman batas-batas sukubangsa berdasarkan penilaian yang mereka lakukan. Merujuk pada pemikiran seperti ini maka anggota sukubangsa tertentu dapat berafiliasi secara kolektif dengan identitas kelompok tertentu sesuai dengan keinginannya. Pergeseran batas-batas sukubangsa akan muncul ketika nilai-nilai yang dibagi bersama anggota dan yang berfungsi sebagai pengikat anggota kelompok tersebut menjadi kabur, karena telah direproduksi dalam *setting* sosial yang berbeda. Kaburnya batas-batas sosial kesukubangsaan salah satunya yang terpenting disebabkan oleh adanya tingkat mobilitas warga masyarakat perkotaan yang semakin meluas dan intensif.

Namun demikian Barth (1969:1-15) cenderung melihat sukubangsa dalam dimensi kelompok yang bertujuan menciptakan batas-batas sosial untuk

menunjukkan bahwa sukubangsa adalah sebuah entitas. Pemahaman Barth tentang sukubangsa sebagai sebuah entitas atau kelompok menimbulkan sebuah problema teoritis, dalam arti, pendekatan tersebut kurang dapat menjelaskan variasi-variasi yang muncul dalam kesukubangsaan itu sendiri (Syafri, 2010). Sebab, pada berbagai sukubangsa yang hidup di perkotaan variasi tersebut muncul bukan hanya karena mereka berasal dari daerah geografis yang berbeda, melainkan sebagai konsekuensi dari adanya hubungan antar kekuatan, baik yang tercipta di antara sesama mereka maupun dengan sukubangsa lainnya dalam konteks politik lokal setempat. Konteks sebagaimana yang dikemukakan oleh (Hobart: 2000:7) merujuk pada kemajemukan situasi yang mendorong munculnya seperangkat tindakan tertentu.

Pemahaman kontekstual (kontekstualisasi) atas sebuah fenomena memperkenalkan sebuah paradigma baru yang disebut sebagai konstruktivisme. Konstruktivisme menampakkan asumsi yang berbeda tentang posisi manusia, yaitu manusia lebih dilihat sebagai subyek dan bukan semata obyek lagi. Konsekuensinya manusia menuntut pengakuan seutuhnya, termasuk kemampuannya untuk kreatif, produktif, reproduktif dan manipulatif. Bertolak dari paradigma konstruktivisme maka (pola) relasi antar sukubangsa yang dapat mendorong terjadinya kekerasan tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang *given* atau ada dan terjadi secara alamiah. Namun seperti yang diulas oleh Hall (1991), etnisitas atau kesukubangsaan serta produk yang dihasilkan dari relasi tersebut sesungguhnya merupakan konstruksi sosial, dalam arti ia dibentuk oleh proses sosial masyarakat baik mencakup perubahan maupun kontinuitas. Oleh karena itu pemahaman atas sebuah fenomena kekerasan tidak lagi semata-mata mempermasalahkan mengapa seseorang atau sekelompok orang berlaku seperti itu, melainkan lebih pada pemahaman kondisi-kondisi seperti apa yang mendorong terwujudnya tindakan kekerasan dalam masyarakat.

Akar Kekerasan di Masyarakat Perkotaan

Hasil kajian Bank Dunia terkait dengan konflik-konflik di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kekerasan dalam konflik antar golongan sukubangsa maupun agama tidak terlalu dipengaruhi oleh keberagaman, tetapi lebih dipengaruhi oleh pengelompokan tempat tinggal orang-orang berdasarkan golongan masing-masing. Tingkat kekerasan dalam konflik juga dipengaruhi oleh meningkatnya kemiskinan, pengangguran, ketimpangan maupun migrasi

penduduk: yang memang kelihatan menyangkut persoalan akses, pemakaian, dan kontrol terhadap sumber daya (Barron, Kaiser dan Pradhan, 2003).

Pembacaan tentang peristiwa konflik yang menghasilkan kekerasan di berbagai wilayah nusantara, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, menunjukkan bahwa isu etnisitas atau kesukubangsaan pada awalnya tidak atau bukan merupakan isu sentral atau isu pemicu terjadinya konflik tersebut. Kebanyakan dari persoalan yang kemudian muncul menjadi konflik sebenarnya berkisar pada upaya perebutan kekuasaan dan sumberdaya alam. Persoalan etnisitas mulai muncul manakala masing-masing pihak yang saling berebut tersebut teridentifikasi secara jelas dan nyata berasal dari sukubangsa yang saling berbeda. Atau bahkan isu agama yang menonjol, dan bukannya etnisitas, tapi karena masing-masing pihak saling berbeda kepentingan satu sama lain (Ju Lan, dkk, 2010:7-8).

Namun bila diruntut lebih lanjut, selain persoalannya terletak pada perebutan kekuasaan maupun sumberdaya semata, atau persoalan etnisitas atau agama yang menonjol, dan menjadi bagian dari perbedaan antara kelompok-kelompok kepentingan yang berebut tersebut, juga berakar pada kondisi hubungan kekuasaan yang tidak seimbang di antara kelompok-kelompok sukubangsa atau agama yang hidup dalam suatu wilayah yang sama dan yang berlangsung sejak lama (Ju Lan, dkk, 2010:9). Kajian yang dilakukan oleh Ju Lan dkk (2010), untuk masyarakat Kalimantan Timur yang heterogen menunjukkan bahwa faktor kesukubangsaan yang menonjol berkisar pada penggolongan 'keDayakan', 'keKutaian', 'keBugisan', dan keBanjaran'. Penggolongan atau konstruksi kesukubangsaan tersebut tidak hanya berakar pada ikatan primordial di masa lampau saja, melainkan tumbuh dalam konteks kekinian, terkait dengan gaung, 'asli', 'putra daerah' maupun 'otonomi daerah'.

Sebagian besar Orang Dayak, yang terdiri dari sejumlah kelompok sukubangsa menempati daerah yang sulit dijangkau sampai dengan daerah perbatasan Malaysia. Orang Jawa masuk ke Kalimantan Timur melalui program transmigrasi sejak masa pemerintahan Orde Lama. Orang Bugis banyak tersebar di daerah pantai dan bermukim di perkotaan. Di daerah perkotaan mereka Orang Bugis melakukan banyak ragam pekerjaan mulai dari birokrat, pengusaha, maupun pekerjaan lainnya. Selain Orang Bugis, maka Orang Banjar juga banyak tinggal di daerah-daerah perkotaan. Orang Cina, oleh komunitas lokal dianggap sama-sama orang asli seperti halnya pendatang Jawa, Bugis

maupun Banjar. Bahkan diyakini terjadi hubungan kawin-mawin yang intens di antara nenek moyang para pendatang ini. Namun bila ditilik secara makro, tesis kebudayaan dominan yang dikembangkan oleh Bruner makin mengakar mengingat heterogenitas masyarakat di Kalimantan Timur (khususnya Samarinda dan Balikpapan) diwarnai dengan karakter budaya Bugis dan Banjar. Di kota Nunukan, sukubangsa Bugis merupakan kelompok yang paling dominan (Tirtosudarmo, 2010:105).

Perlas dalam Tirtosudarmo (2010:114) mengemukakan bahwa disamping politik, dinamika ekonomi serta pola perdagangan yang berkembang juga sangat berpengaruh terhadap migrasi Orang Bugis. Bagi Orang Bugis, migrasi merupakan bagian dari strategi ekonomi pasar. Pedagang-pedagang Bugis sejak lama sudah dikenal sebagai pedagang-pedagang perantara yang menjual berbagai barang konsumsi maupun komoditi ke daerah perbatasan antara Kalimantan Timur dan Sabah. Bahkan, di kota Tarakan. Sebuah kota yang dekat dengan perbatasan, pedagang Bugis dikenal sebagai pedagang yang membawa barang elektronik maupun pakaian dari Pasar Tanah Abang (Jakarta) (ibid:121-122). Para perantau Bugis dikonstruksikan memiliki sikap dasar kewiraswastaan yang handal.

Konstruksi yang berkembang tentang Orang Dayak di Kalimantan Timur justru menjadi hampir kebalikannya. Stephanus Djuweng mengemukakan bahwa sebelum masa kemerdekaan, Dayak merupakan kata ejekan yang memilukan hati. Berbagai strotipe bahkan prejudice berkembang tentang Dayak. Manakala seseorang menyimpang dari norma-norma umum, baik norma Islam maupun penjajahan Belanda, maka disebut sebagai Dayak. Ikan dan belacan busuk di toko disebut Dayak. Dayak diartikan sebagai kotor, kafir tidak tahu aturan, buas, liar, terbelakang dan tidak berbudaya. Dayak juga diartikan sebagai orang liar Borneo yang berekor, atau bahkan pemburu kepala dari Borneo. Di Era Pembangunan mereka Orang Dayak digolongkan sebagai perambah hutan, suku terasing, peladang berpindah maupun suku terbelakang. Pola pertanian mereka harus dirubah dan budaya mereka harus dihilangkan (Ju Lan, dkk, 2010: 77).

Di perkotaan tidak banyak Orang Dayak yang menjadi pelaku ekonomi. Di bidang pemerintahan pun jumlah mereka relatif sangat kecil. Selain itu hanya sedikit tokoh-tokoh Dayak memangku jabatan tinggi. Kondisi seperti ini cukup kasat mata. Dua puluh tahun yang silam Coomans mengkonstruksikan bahwa:

...;Kebudayaan suku-suku Dayak tidak memiliki perspektif masa depan; karena dalam pandangan beliau, setiap kebudayaan yang berlandaskan struktur

geneologi harus membuka diri untuk menerima nilai-nilai baru. Di antara nilai-nilai baru tersebut terdapat nilai yang mondial atau universal seperti pendidikan, teknologi, pengetahuan dan agama. Sementara yang ada dan terpelihara oleh suku-suku Dayak adalah kesenian tradisional, seperti seni ukir, seni tari, seni musik, seni sastra dan sebagainya....(ibid, 136)

Berbagai gejala di atas menunjukkan bahwa hubungan yang berpotensi konflik antara Orang Dayak dan Kutai-Bugis sebenarnya sudah berlangsung lama. Kombinasi antara pengalaman masa lampau dengan masa kini kemungkinan yang mendasari konflik laten antara orang Dayak dan Kutai-Bugis yang tidak kasat mata. Berbagai faktor pemicu dapat mendorong terjadinya konflik kekerasan (ibid,79).

Pemolisian Berbasis Komuniti

Prof. Parsudi Suparlan (2008, 103) mengemukakan bahwa pemolisian muncul dan berkembang sebagai respon terhadap berbagai corak permasalahan yang muncul dan berkembang di masyarakat dan komuniti-komuniti yang dilayaninya. Dalam penerapan pemolisian telah tumbuh kesadaran akan adanya keanekaragaman sukubangsa dan keyakinan keagamaan, baik pada tingkat perkotaan maupun pada tingkat pedesaan. Persoalannya kemudian adalah meningkatkan kemampuan pemahaman mengenai keanekaragaman yang ada setempat bagi petugas kepolisian untuk secara efektif mengembangkan potensi keberagaman komuniti. Salah satu cara yang mungkin dilakukan terkait dengan ini adalah mendokumentasikan berbagai keanekaragaman sukubangsa, keyakinan keagamaan dan kebudayaan yang ada dalam wilayah-wilayah administrasi kepolisian setempat.

Konsekuensi dari usulan di atas adalah dikembangkannya kemampuan untuk merancang etnografi yang pada hakekatnya berisikan konstruksi tentang masyarakat dan kebudayaan setempat, atau lebih khusus di tempat terjadinya pertarungan antar kekuatan yang mengaktifkan atribut askriptif guna menggalang kekuatan sosial untuk memenangkan pertarungan tersebut. Melalui etnografi yang holistik, sistemik, konstruktif dan kontekstual yang secara sederhana dicontohkan dalam uraian tentunya akan didapat pemahaman awal tentang potensi-potensi konflik yang ada setempat. Pemahaman awal tentang potensi-potensi konflik yang ada membuka jalan bagiantisipasi tindak konflik kekerasan yang berkembang di masyarakat yang bersangkutan.

Kemampuan merancang etnografi yang kontekstual membutuhkan penguasaan seperangkat pengetahuan yang berkaitan dengan etika, paradigma, teori/konsep maupun metodologinya. Paradigma dalam tulisan ini didefinisikan sebagai suatu perangkat keyakinan yang mendasar yang membimbing tindakan peneliti dalam melakukan penelitian/kegiatan ilmiah lainnya, pada disiplin ilmu yang ditekuninya. Pada awalnya positivisme berkembang berkembang sebagai rujukan paradigma dalam merancang sebuah etnografi. Pengaruh positivisme ini menuntut penggambaran yang holistik atau sistemik, dimana keseluruhan unsur-unsur kebudayaan suatu masyarakat dan komunitas diteliti serta diungkapkan secara mendalam dan menyeluruh. Hal yang kemudian tampak menonjol adalah kajian tentang kebudayaan tersebut cenderung menjadi deskriptif, tanpa fokus permasalahan dan bercorak taksonomik kebudayaan. Begitu pula halnya dengan pemahaman tentang sukubangsa, batas-batas geografis ini sangat jelas bermain dalam pendefinisianya. Ciri atau karakteristik sebuah sukubangsa menjadi pusat kajian yang penting, dimana keberadaan satu sukubangsa tampil melalui keterpisahan geografis dengan sukubangsa lainnya, atau tanpa interaksi dengan sukubangsa lainnya. Kemajemukan dalam konteks ini terbangun melalui suasana dimana tidak terbentuk jalinan hubungan antar sukubangsa yang intensif.

Belakangan ini, terutama sejak pertengahan abad XX paradigma dalam ilmu pengetahuan berkembang pesat, guna menanggapi, menyempurnakan berbagai persoalan yang muncul dalam paradigma *positivisme* tersebut. Seperti yang ditunjukkan oleh pemikir *post-positivisme*, bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan yang tajam antara cara berfikir kita sehari-hari dengan cara berfikir ilmiah itu. Berfikir secara ilmiah dan menggunakan akal sehat itu pada dasarnya adalah sama, walaupun timbul perbedaan itu terjadi dalam tingkatan saja. Misalnya ilmu pengetahuan menggunakan prosedur tertentu untuk memastikan bahwa observasi yang dilakukan dapat diverifikasi, akurat dan konsisten. Hal lain yang ditunjukkan oleh *post-positivisme* adalah sebenarnya manusia itu tidak sempurna yang dibayangkan kaum positivis, melainkan manusia memiliki kelemahan dalam menangkap gejala-gejala yang ada di sekitarnya secara sempurna atau sebagaimana adanya. Dengan kata lain semua hasil pengamatan manusia itu mengandung "kadar" penyimpangan yang tinggi (Guba, 1990: 21). Untuk itu diperlukan metode triangulasi guna mengantisipasi makin meningkatnya kadar penyimpangan tersebut. Sebab pengamatan ilmiah sebenarnya dilakukan dengan landasan teoritis, sementara pelaksanaan dan sasaran kajiannya memiliki latarbelakang kebudayaan yang berbeda. Penganut

post-positivisme ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan penganut paradigma interpretivisme, yang berkeyakinan bahwa kita sebenarnya melakukan konstruksi terhadap pandangan kita tentang dunia. Pemahaman bahwa dunia sekitar adalah suatu entitas yang stabil dan sempurna mulai diragukan. Dengan demikian objektivitas itu bukan sesuatu yang berada di luar individu, melainkan di dalam diri individu itu sendiri. Namun kedua paradigma ini yaitu *positivisme* maupun *post positivisme* masih beranggapan sama bahwa realitas sosial itu adalah sesuatu yang ada jauh di luar sana (*out there*).

a. Paradigma interpretivisme dan atau Konstruktivisme.

Melalui *post positivisme* ditekankan bahwa konstruksi adalah satu hal yang dibutuhkan dalam upaya mengatasi keterbatasan daya tangkap manusia mempelajari fenomena yang ada di luar dirinya. Penekanannya tidak lagi pada verifikasi melainkan pada falsifikasi. Azas probabilitas menjadi penting dalam hal ini. Dalam kajiannya ditekankan tentang pencarian makna-makna dan tujuan-tujuan yang menentukan terwujudnya tindakan manusia itu. Dengan demikian dapat dijelaskan apa yang menjadi penyebab tindakan sosial tersebut, dan pemahaman akan hal ini menjadi dasar guna memprediksi tindakan manusia itu.

Tradisi yang bersandar pada penjelasan sosial seperti ini kemudian mulai ditentang dengan ditemukannya realitas lain dari kehidupan manusia itu. Schwandt (1994:119-120) mengungkapkan perkembangan interpretivisme sebenarnya bukan hanya menunjukkan perkembangan metodologi tentang kajian ilmu pengetahuan, lebih jauh merupakan “revolusi”, dalam pendefinisian tentang dunia sosial itu sendiri dan arti penting tentang sebuah pemahaman, yang pada akhirnya juga mendatangkan konsekuensi bagi pengembangan metodologinya. Dunia atau realitas sosial tidak lagi dilihat sebagai terdiri dari satu perangkat fakta-fakta (*social facts*), yang berisikan tindakan individu yang kasat mata, yang dapat secara langsung diamati, serta keyakinan-keyakinan yang dimiliki, dan perangkat-perangkat lainnya yang memotivasi bagi terwujudnya tingkah laku. Kelemahan dari paradigma sebelumnya dalam melihat realitas sosial adalah pengabaianya terhadap suatu kenyataan yang amat penting, yaitu intersubjektivitas yang tercipta dalam kehidupan manusia. Tepatnya suatu makna yang dimiliki secara bersama (Taylor, dalam Schwandt, 1994:120). Dalam kondisi seperti ini bukan penjelasan atau eksplanasi sosial yang diperlukan, melainkan adalah proses-proses dengan mana makna-makna tersebut diciptakan,

dinegosiasikan, dan dimodifikasi dalam sebuah konteks tindakan manusia. Pemahaman tentang konteks dari tindakan ini yang tidak tampak dalam paradigma *positivisme* dan *postpositivisme*. Dengan demikian dalam memahami kebudayaan yang menjadi pusat telaah dalam etnografi, tidak lagi dilihat dalam artian keberlakuannya secara universal, melainkan operasionalisasi kebudayaan dalam konteks-konteks tertentu.

Interpretivisme berfokus pada pemahaman tentang pengalaman manusia. Pengalaman-pengalaman yang dimiliki menunjukkan bahwa manusia itu berkemampuan menciptakan makna dan mendistribusikan ke sesamanya. Oleh karena itu kerja etnografi itu diarahkan pada pemahaman dari makna yang terkandung dalam fenomena sosial. Sementara kontruktivisme lebih menekankan pada relativisme, dan berfokus pada keragaman serta pertentangan (konflik) yang muncul dalam realitas sosial tersebut. Norman K. Denzin (2000), menjelaskan dasar pijakan epistemologinya adalah *stable reality is social construction and given meaning*. Konstruksi sosial ini dibangun dan “dikerjakan” melalui konteks-konteks tertentu. Berbicara soal konteks ini “sayap-sayapnya” lebar sekali, mulai dari yang sifatnya fisik, normatif, sosial, ekonomi dan religius. Atau dalam bahasa yang lain disebutkan sebagai holistik. Konsekuensinya, realitas sosial yang ada di sekitar hidup manusia itu sebenarnya tak lebih adalah teks-teks yang terbingkai dan penuh makna. Kerja seorang etnografer dalam mempelajari sebuah masyarakat adalah membaca teks-teks ini satu persatu serta menangkap dan merangkai makna yang ada dibalik teks-teks tersebut. Sehingga telah banyak dibuktikan bahwa konteks yang berbeda, menyebabkan konstruksi sosial yang muncul cenderung tidak sama. Dengan kata lain, realitas sosial yang ada, tidaklah utuh/bulat atau berwajah *social fact* sebagaimana pernah diajarkan melalui paradigma *positivisme*. Melainkan sebuah perjalanan rancang bangun/konstruksi sosial, dialog, negosiasi yang berkembang dari tingkat komunitas sampai masyarakat yang lebih luas.

Para penekun yang bekerja dengan paradigma interpretivisme ini bila tiba ke satu komunitas ibaratnya masuk dalam sebuah perpustakaan. Kalau seseorang masuk ke sebuah perpustakaan tentu waktunya habis tersita membaca dan memahami teks-teks yang terbingkai dalam buku-buku acuanya. Sama halnya dengan masuk ke dalam sebuah komunitas atau masyarakat luas, para penekun dituntut untuk mampu membaca “teks-teks” kontekstual yang mewarnai realitas sosial yang sedang dipelajarinya. Bagi mereka, komunitas atau masyarakat luas adalah laboratorium atau perpustakaan utama mereka. Teks-teks bermuatan

makna ini kemudian disusun dan dirangkai sedemikian rupa, dan merupakan bahan dasar untuk membangun sebuah *representation of community that belongs to a certain culture*. Representasi ini berisikan sejumlah *voices* yang cenderung bernada tidak sama, kontradiktif, atau hasil-hasil sebuah dialog, dan jangan salah bukannya tak berujung pangkal, tapi masih dalam benang merah *social conventions*. Varian-varian yang muncul terwakili melalui *voice* yang keluar dalam proses dialog. *Vioce* sederhananya adalah segala sesuatu hal yang muncul dalam waktu yang sama. Dari *voice* kemudian muncul sebuah pendengaran. Dari mendengar kemudian berbuah persepsi, menyadari adanya sebuah “gaung”, memperhatikan sampai pada pemahaman.

Upaya membangun sebuah representasi atau membangun sebuah dunia ungkap para ahli menuntut penekun untuk tidak mempelajari semata *lived experience* tapi berfokus pada *lived textuality*. Mengapa, karena *lived experience* itu sifatnya individual dan tidak mencerminkan sebuah representasi. Memang seolah terlihat *textuality* ganda dalam kerja etnografi ini, bila dihubungkan antara *lived experience* dengan *lived textuality* tersebut. Bentuk hubungannya kira-kira sebagai berikut, *real lived experiences are shape by prior textual representations and understandings* (lihat, Denzin, 2000). Geertz (1973), pernah berujar makna itu memang berkernbang ditingkat publik. Warga sebuah kota misalnya sama-sama sepakat kalau lampu merah itu sama dengan di larang jalan, sebaliknya lampau hijau itu sama dengan dibenarkan berjalan. Kesepakatan ini kemudian ditransformasikan ke masing-masing individu dan menjadi apa yang disebut sebagai *lived experience*. Sejauhmana transformasi ini dijadikan pedoman bertindak bagi individu warga masyarakat itu bervariasi coraknya. Ada sebagian warga yang patuh benar pada aturan lampu jalan tersebut, ada yang setengah-setengah, atau kalau ketemu lampu merah dan kebetulan tidak ada polisi, tiba-tiba ditabrak aja. Jadi kalau kita membaca sebuah varian, jangan berhenti disitu saja, melainkan langkah lebih dijauhkan untuk mencari apa yang menjadi sebuah konvensi dari varian tersebut (*lived textuality*).

b. Metodologi dalam Etnografi

Kerja yang dilakukan dalam etnografi berlandaskan pada metodologi kualitatif. Kerja dengan menggunakan metodologi kualitatif ini adalah kerja merangkai-rangkai dan mbingkai makna. Ibarat seorang produser film, film yang dibuatnya sebenarnya merupakan susunan adegan-adegan, simbol-simbol

yang penuh makna, dan menjadi kenyataan sebuah tayangan. Adegan-adegan dalam film tersebut terkadang sebagian penuh kekerasan, romantisme dan sebagainya.

Untuk mendukung cara kerja seperti ini tentu ada asumsi-asumsinya sampai pada tingkatan *theoretical foundations*. Pertama, sudah disebutkan bahwa yang namanya realitas dipahami bukan seperti adanya atau *given*, melainkan sebagai sebuah konstruksi sosial. Dalam pemahaman realitas seperti ini, para penekun tidak mengukur *validitas* dari sudut objektivitas, yang terukur, terkalkulasi, atau malah eksak. Validitas itu diukur melalui dimensi subjektivitas. Namun orang menyalah artikan kata subjektivitas ini. Seolah-olah diartikan semata kebenaran yang dibuat oleh penekun/peneliti sendiri. Itu tidak benar, yang benar adalah dikatakan subjektivitas karena kebenaran yang diajukan adalah kebenaran yang dinyatakan langsung/sendiri oleh subjek yang dipelajari, yang terlibat dalam proses dialog, dan yang memberikan pemaknaan atas suatu gejala tertentu. Itulah ukuran validitasnya. Selain itu banyak pula pakar yang mengatakan kajian subjektivitas ini tidak ilmiah, karena tidak menyertakan angka-angka atau perhitungan-perhitungan tertentu. Ini pun tidak benar, karena kerja dengan paradigma interpretivisme yang landasannya adalah metodologi kualitatif, memang tidak dimaksudkan untuk mengukur sesuatu, atau melihat umat manusia itu sebagai himpunan-himpunan, tapi memahami bagaimana umat itu memberi makna pada apa yang dilakukannya. Dalam pencarian makna itu, maka jarak antara penekun atau etnograf dengan masyarakat yang dikajinya “sengaja” diputuskan, agar dapat melebur dan menjadi bagian dari masyarakat yang bersangkutan.

Dalam metodologi kualitatif, metode “peleburan diri ini dikenal dengan nama *participation observation*”. Dalam metode ini instrumen utamanya adalah para peneliti/penekun itu sendiri, bukan instrumen-instrumen yang lain. Arti kata bagian dari masyarakat, atau metode partisipasi observasi, adalah penekun tidak hanya mengamati saja, melainkan juga ikut merasakan langsung getar-getir kehidupan warga masyarakat yang bersangkutan, pada level, suasana, kondisi, cuaca yang tertentu. Dengan melalui proses-proses ini akan terjadi dialog yang panjang dan mendalam. Konteks-konteks dimana dialog itu berlangsung juga dapat dipahami secara menyeluruh atau holistik. Sehingga keterkaitan fungsional antara komponen-komponen yang berkembang dalam sebuah komunitas dapat dirangkai dengan jelas.

Konsekuensi lebih lanjut, kerja dengan cara ini memang menuntut waktu yang relatif lama. Tuntutan waktu ini sukar dihindarkan mengingat *rapport* itu adalah suatu jalan penting yang harus ditempuh dalam menjadikan diri sebagai bagian dari sebuah komunitas, sehingga kehadiran ditengah masyarakat tidak dianggap *absurd*. Seringkali pula metodologi kualitatif ini dituding tidak mampu menghasilkan generalisasi sebagai landasan penciptaan sebuah teori. Teori pada dasarnya adalah hubungan antar gejala. Dalam tingkat hubungan antar gejala ini cakupannya bisa dalam lingkup komunitas yang dikaji maupun melebar ke luar lingkup komunitas yang bersangkutan.

c. Etika Dalam Penelitian Etnografi

Dalam tulisan ini etika didefenisikan sebagai pedoman menyeluruh dan memberikan arah tentang bagaimana seharusnya seorang individu membina hubungan dengan individu lainnya dalam situasi tertentu. Pedoman ini kemudian dioperasionalkan dalam sejumlah prinsip-prinsip yang menata bagaimana tindakan yang dilakukan dalam membina hubungan dengan atau antar individu, serta alasan-alasan yang ada dibalik tindakan tersebut¹.

Dalam kajian etnografi pengembangan etikanya berpatokan pada tiga prinsip utama², yaitu: (1) prinsip saling menghormati; (2) anti terhadap pemaksaan maupun manipulasi; (3) berpihak pada nilai-nilai dan pranata demokrasi. Prinsip saling menghormati ini sebagaimana diungkapkan oleh John Rawl (dalam House³) dieskpresikan dalam cara memperlakukan warga masyarakat dimana kegiatan etnografi tersebut dilakukan. Dalam memahami kehidupan suatu masyarakat hendaknya pemahaman tersebut ditegakkan melalui sudut pandang masyarakat tersebut, persepsi mereka tentang berbagai hal. Dengan kata lain tercakup dalam ungkapan saling menghormati ini adalah upaya untuk memahami tujuan maupun kepentingan orang lain (di luar diri peneliti), serta mengingatkan berbagai kekurangan dalam perwujudan tindakan, guna memenuhi tujuan dan kepentingan tersebut. Empati adalah isitilah yang sering digunakan untuk merujuk hal ini. Dalam penelitian lapangan prinsip seperti ini seringkali di salah artikan, dalam arti seorang peneliti sudah merasa membina relasi saling menghormati, manakala

1. Smith, L.M, 1990. Ethics, Field Studies and the Paradigm Crisis. Dalam: Guba. E.G (ed). The Paradigm Dialog (ed). Sage Publication. Hal 139-157
2. House, E.R, 1990. An Ethics of Qualitative Field Studies. Dalam: Guba. E.G (ed). The Paradigm Dialog. Sage Publication. Hal 158-164
3. House, opcit, hal. 158

yang bersangkutan sudah terjun ke masyarakat yang jadi pusat kajiannya. Bahkan lebih lanjut prinsip saling menghormati ini sering diartikan sebagai suatu “kebebasan” untuk menilai secara positif maupun negatif tentang corak kehidupan masyarakat setempat. Prinsipnya dalam suatu kegiatan pengumpulan data di lapangan, peneliti harus mencatat, mengamati tindakan yang dilakukan warga masyarakat, serta mendengarkan berbagai informasi yang berkembang di masyarakat tersebut.

Selain itu sering pula disalah artikan bahwa, prinsip saling menghormati ini terhenti sejalan dengan berakhirnya kegiatan di lapangan. Pada hal dalam menuliskan etnografi ini pun sebenarnya prinsip tersebut harus dipertahankan. Misalnya dengan cara menghindari untuk mengungkapkan hal-hal yang sangat sensitif yang ada dalam kehidupan masyarakat tempat studi etnografi itu dilakukan. Termasuk juga “melindungi” identitas warga masyarakat tertentu sebagai sumber informasi, kalau memang pengungkapan ini dianggap “membahayakan” dirinya.

Prinsip berikutnya, yaitu anti terhadap pemaksaan maupun manipulasi, sangat penting dalam menjalin “persahabatan” dengan warga yang menjadi acuan studi ini. Tentunya agak kurang mengenakan kalau warga masyarakat dipaksa untuk menjawab sejumlah pertanyaan, yang semata-mata ditujukan untuk menjawab kepentingan peneliti. Jawaban-Jawaban tersebut kemudian dimanipulasi untuk informasi tentang cara hidupnya. Pemaksaan maupun manipulasi seharusnya “ditumpulkan” melalui sebuah dialog yang terus menerus antara peneliti dan warga masyarakat yang jadi acuan dalam penelitian⁴.

Hal penting lainnya berkaitan dengan prinsip saling menghormati ini adalah peneliti wajib menjelaskan tentang maksud dan tujuan penelitiannya, agar warga masyarakat ikut memahami dan memberikan masukan yang memang dibutuhkan untuk penelitian tersebut. Bahkan seringkali ada kejasama dimana warga dapat menunjukkan dan menseleksi orang-orang yang dianggap relevan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Bagaimanapun penelitian ini berlangsung dalam suatu konteks tertentu. Pentingnya konteks ini sejalan dengan beragamnya dimensi yang berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan. Sukar sekali (terutama dimasa belakangan ini) melihat realitas kebudayaan yang berkembang dalam suatu masyarakat sebagai suatu yang utuh, bulat dan menyatu. Sebab melalui konteks ini kebenaran (tentang suatu kebudayaan itu

4. Kuper, A. 1999. Culture. The Anthropologist Account. Harvard University Press. Khususnya Bab. I

terungkap). Artinya konteks inilah yang memberikan kekuatan dari suatu interpretasi. Kekuatan ini terletak pada lingkup historis dimana pemaknaan itu dilakukan⁵. Mengacu pada pendapat penganut pemikiran konstruktivisme, bahwa identitas suatu kebudayaan itu hanya dapat dikenali melalui dialog yang terus menerus, atau melalui dialog dalam konteks tertentu dimungkinkan fabrikasi dari kebudayaan sukubangsa tertentu.

Realitas yang dihadapi dewasa ini adalah tidak ada lagi suatu keterisolasian, namun cara-cara hidup yang dikembangkan oleh manusia saling pengaruh mempengaruhi dalam perjalanan waktu. Konsekuensinya tidak relevan lagi bersikukuh tentang bentuk konservatif dari kebudayaan suatu sukubangsa, atau tentang batas-batas yang baku tentang kebudayaan tersebut yang cenderung didiskripsikan tanpa mempertimbangkan kaitan waktu. Kebudayaan di zaman yang sangat pesat perubahan ini cenderung terbelah atau saling bertentangan bagian-bagiannya (*contested*), temporal dan dalam proses penciptaan terus-menerus⁶. Dengan kata lain, premis yang banyak dikembangkan⁷ sekarang ini dalam menjajagi kebudayaan adalah pertama bahwa kebudayaan (sukubangsa) itu “rentan” atau tak kuasa menolak perubahan yang terjadi. Kedua, oleh karena itu kebudayaan dan identitasnya itu tidak tetap keadaannya, cenderung tidak stabil dan tidak pasti “wujudnya”. Ketiga, dalam perjalanan waktu kebudayaan terus mengalami konstruksi, dekonstruksi dan rekonstruksi ulang. Konsekuensinya upaya untuk melakukan komparasi atau perbandingan guna membangun model-model baku dari kebudayaan (tipologi) telah mengalami kehilangan pijakan, mengingat sukarnya memprediksi dinamika yang tampil dalam kebudayaan tersebut, serta beragamnya konteks yang muncul. Akibatnya kebudayaan merupakan salah satu dari dua atau tiga istilah yang paling rumit. Bukan hanya karena kata-kata tersebut memiliki sejarah yang panjang, tapi yang paling penting kata kebudayaan telah dipakai untuk memisahkan antara yang ide dengan yang materi.

Prinsip ketiga dari etika dalam etnografi adalah keberpihakan pada nilai-nilai dan pranata demokrasi. Artinya kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat sukubangsa manapun, dan tentu saja dimanapun kebudayaan tersebut dikembangkan, harus diperlakukan sama dan setara. Tidak dibenarkan lagi untuk menilai suatu kebudayaan itu lebih rendah, atau lebih tinggi. Premis tentang

5. Kuper, A. 1990. *Culture. The Anthropologist Account*. Harvard University Press. Bab VI.

6. Kuper, opcit. Hal. 209

7. Clifford, J. 1988. *The Predicament of Culture. Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Arts*. Cambridge. Mass. Harvard University Press.

kesetaraan ini sekarang berkembang pesat melalui multikulturalisme. Intinya adalah pengakuan yang sama dan setara atas hak-hak komunitas yang dalam kerangka masyarakat majemuk di-stigmatisasi sebagai golongan minoritas. Golongan minoritas ini adalah golongan “kelas dua”, yang eksistensinya sangat ditentukan oleh golongan mayoritas. Bahkan ada kecenderungan mereka golongan minoritas ini “mengingkari” identitas diri maupun kebudayaannya, dan mengambil alih sebagian (karena kalau keseluruhan tidak mungkin, mengingat terbatasnya akses yang mereka miliki) identitas golongan dominan-mayoritas⁸. Di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, ide tentang multikulturalisme memiliki sejarah yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan popularitas gaungnya belakangan ini, dibandingkan dengan yang digaung-gaungkan sekitar tahun 70 an oleh Australia dan Kanada.

Dalam masyarakat multikulturalisme, pengakuan akan hak-hak minoritas menjadi penting. Jangan terus dirusak, diputuskan bahkan dihilangkan seperti pernah terjadi di masa-masa lalu. Keadaan seperti ini yang berkembang pada masyarakat majemuk telah menyuburkan konflik-konflik bernuansa kekerasan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat luas. Beban berupa konflik horizontal ini yang muncul di berbagai tempat belakangan ini dapat dilihat sebagai refleksi dari kesadaran penduduk setempat bahwa mereka sebenarnya memiliki sumberdaya yang besar, namun tidak memperoleh keadilan yang sewajarnya.

Kedua, tidak dibenarkan lagi adanya pendominasian oleh satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Adapun yang terus di “gaungkan” adalah keberagaman kebudayaan sebagai acuan atau pedoman bertindak bagi pemilik atau pendukungnya. Dialog yang menjadi warna lain dari multikulturalisme perlu dikeraskan gaungnya. Dialog menuntut perimbangan kekuatan atau kekuasaan. Ketiga, dan yang memang erat kaitannya dengan poin di atas adalah, digaungkannya juga upaya untuk mencegah terjadinya homogenisasi sebagai konsekuensi berkembangnya corak kebudayaan tertentu terhadap masyarakat lokal.

Kesimpulan

Tulisan ini telah menguraikan secara ringkas tentang permasalahan konflik kekerasan yang tumbuh di masyarakat luas dan merujuk sebuah studi kasus

⁸ Suparlan, P. 2000. Identity and Nationality among The Sakai. Makalah; Jurnal Antropologi Indonesia.

guna mendeteksi akar permasalahannya. Gejala yang tampak adalah bukannya perbedaan yang menjadi potensi konflik dan dapat mencetuskan konflik kekerasan, melainkan terkait dengan konteks relasi kekuasaan yang tidak seimbang di antara kelompok sukubangsa dan perebutan dalam penguasaan sumberdaya yang strategis dan langka. Melalui tulisan ini juga diusulkan upaya sistematis yang dapat dilakukan dalam tugas pemolisian guna merespon permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya berkaitan dengan fenomena konflik kekerasan tersebut. Inti dari upaya penaggulungannya terletak pada pengenalan dan pemahaman akan keberagaman kebudayaan masyarakat sukubangsa yang membuka interaksi terus menerus di antara mereka.

Pendokumentasian tentang keberagaman suku bangsa dan kebudayaannya dapat dilakukan dengan metode kerja etnografi yang holistik, sistemik, konstruktif dan kontekstual serta berfokus pada suatu permasalahan tertentu. Etografi dapat menjadi bahan dasar untuk tugas pemolisian berbasis komuniti. Beberapa tahapan kerja etnografi tersebut diruaikan secara ringkas untuk merancang maupun mengimplementasikannya.

Rujukan

Baron, P. K. Kaiser dan M. Pradhan

2003 *Local Conflict in Indonesia: Measuring incidence and identifying Pattern*. Draft. T.T. World bank

Barth, Fredrik,

1969 *Ethnic Groups and Boundaries*. Boston: Little, Brown & Co.

Hall, Stuart

1991 "Old and New Identities, Old and New Ethnicities", dalam Anthony D. King (editor). *Culture, Globalization and the World-System: Contemporary Conditions for the Representation of Identity*. Hampshire dan London: The Macmillan Press, Ltd.

Hobart, Mark

2000 *After Culture. Anthropology as Radical Methaphysical Critique*. Duta Wacana University Press

Ju Lan, T, Deddy. S. Adhuri, Achmad Fedyani Saifuddin dan Zulyani H
2010 Klaim, Kontestasi, dan Konflik Identitas. Lokalitas vis-a-vis
Nasionalitas. Jakarta: Institut Antropologi Indonesia (segera terbit)

Suparlan, Parsudi

2008 Ilmu Kepolisian. Diedit oleh Chryshnanda, DL dan Yulizar Syafri.
Jakarta: YPKIK

2008 Dari Masyarakat Majemuk Menuju Masyarakat Multikulturalisme.
Diedit oleh Chryshnanda, DL dan Yulizar Syafri. Jakarta: YPKIK

Syafri, Yulizar

2010 Kontekstualisasi Kesukubangsaan di Perkotaan. Jakarta: Institut
Antropologi Indonesia (segera terbit).

Tirtosudarmo, R

2007 Mencari Indonesia. Demografi-Politik Pasca-Soeharto. Jakarta:
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

